



BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
www.bpbd.temanggungkab.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak

dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Temanggung, 2019

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

G. WALNGADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 1963020 199303 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	8
Tugas pokok dan fungsi	9
Permasalahan Utama	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	11
Indikator Kinerja Utama	12
Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Komitmen Pimpinan	17
B. Pengukuran Kinerja	17
C. Pelaksanaan Agenda Reformasi	18
D. Capaian kinerja organisasi	20
E. Capaian kinerja sasaran	22
F. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
LAMPIRAN II Laporan pengukuran kinerja s.d triwulan IV tahun 2018	
LAMPIRAN III Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Foto gambar sertifikat/ piala/ Penyerahan dll)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	24
Tabel 3.1	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
Gambar 2.1	24
Gambar 3.1	43

BAB I

PENDAHULUAN

- ✓ **Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi**

=====
Contoh :

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat saat kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sebagai tugas pokok dan fungsinya.

C. **KEPEGAWAIAN**

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	2	
	b. SMP	-	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)	-	
	e. S-1 dan D-IV	3	
	f. S-2	4	
Jumlah		12	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	4	
	c Gol III	7	
	d Gol IV	-	
Jumlah		12	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	-	
	c Eselon IV	4	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	8	
	Jumlah	12	
	JUMLAH	12	

B. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sebagai tugas pokok dan fungsinya.

Secara singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan penanggulangan bencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No.24 Tahun 2018, bertujuan untuk antara lain :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

C. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKJIP **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- ✓ Pada bagian ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.

=====



PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah ditetapkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA,
DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Guna mewujudkan visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Modern yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2018	Rumus
1	2	3		5	7
1	Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan dan Penanganan Bencana	1	Prosentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana	100	Jumlah kerusakan akibat bencana yang terbangun kembali melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana dibagi jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi
		2	Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan social selama masatanggap darurat	100	
		3	Prosentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai **lampiran I** perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 8 (delapan) program kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 4.908.899.400 . Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	TARGET 2018
1	2	3	4
1. Meningkatnya Pencegahan penanggulangan dan Penanganan Bencana	Prosentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana	Jumlah kerusakan akibat bencana yang terbangun kembali melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana ----- Jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi	100
	Prosentase Korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat ----- Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100

		Prosentase korban bencana skala kabupaten yang di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah korban bencana skala kab/kotayang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun ----- Kumlah korban bencana skala kab/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	
		Tersedianya alat EWS di daerah rawan Bencana		3 desa
		Pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana dalam 1 (satu) tahun		3 desa
		Tersedianya kebutuhan dasar bagi korban bencana		12 bulan
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran pemeliharaangedung peralatan dan kendaraan	Tersedianya jaringan komunikasi jaringan listrik dan air		12 bulan
		Tersedianya peralatan perlengkapan kantor dan alat tulis		12 bulan
		Terpeliharanya gedung peralatan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas		12 bulan
		Tersedianya peralatan kebersihan dan petugas kebersihan		12 bulan
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor		12 bulan
		Tersedianya cetak dan penggandaan		12 bulan
		Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan

		Terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah		12 bulan
		Tersedianya makanan dan minuman		12 bulan
	Terwujudnya perencanaan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan	Tersedianya dokumen perencanaan		5 dok
	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi aparatur penanganan bencana	Terselenggarana pelatihan pendidikan dan sosialisasi bagi aparatur dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana		200 orang

Dalam perjanjian kinerja yang disepakati terdapat 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pencegahan penanggulangan dan Penanganan Bencana
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran pemeliharaangedung peralatan dan kendaraan
3. Terwujudnya perencanaan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi aparatur penanganan bencana

Adapun Sasaran Strategis pada tahun 2018 adalah Meningkatkan Pencegahan penanggulangan dan Penanganan Bencana dan ditetapkan 3 indikator ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Prosentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana
2. Prosentase Korban bencana skala kabupaten yang menerimabantuan social selama masa tanggap darurat
3. Prosentase korban bencana skalakabupaten yang di evakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap
- 4.

D. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah

2. **SIKAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.

3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.2 Sistem perencanaan daerah

Gambar 2.3 Sistem informasi Akuntansi daerah

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

- Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- Capaian kinerja/ sasaran
- Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Zn kinerja sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara **target dan realisasi kinerja** tahun ini (2018);
 2. Membandingkan antara **realisasi kinerja** serta **capaian kinerja tahun ini** (2018) dengan tahun sebelumnya (2017);
 3. Membandingkan **realisasi kinerja sampai dengan tahun ini** (2018) dengan **target jangka menengah** (2018) yang terdapat dalam dokumen Restra Perangkat daerah;
 4. Membandingkan **realisasi kinerja** tahun ini dengan **standar nasional** (jika ada);
 5. Analisis **penyebab keberhasilan/ kegagalan** atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**;
 7. **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan** ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2018 sebagai pelaksanaan amanah dari Bupati Temanggung. Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis (Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung** antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Exelence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**.
- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang

tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

D. Capaian Kinerja sasaran

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang ada pada misi I adalah sebagai berikut:

Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada satu indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana											
INDIKATOR KINERJA		2015			2016			2017			Target Akhir RPJMD
		TK	RK	CK	TK	RK	CK	TK	RK	CK	
1	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
2	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Rata rata capaian				100 %			100 %			100 %	

Ket. : TK = Target Kinerja R = Realisasi Kinerja CK = Capaian Kinerja *) Angka Sementara

a. Prosentase tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana melalui Rehabilitasi dan rekonstruksi Sementara Tanggap Darurat Pasca Bencana

Jumlah Prosentase Kerusakan Fisik Akibat Bencana yang pada periode tanggap darurat di Kabupaten Temanggung yang yang tertangani selama tiga tahun terakhir dapat tertangani

seluruhnya 100%. Hal membuktikan bahwa kepedulian dan perhatian pemerintah daerah kabupaten, pada masa tanggap darurat sangat nyata. Tren jumlah tertanganinya kerusakan fisik pada masa tanggap darurat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 memiliki kecenderungan untuk naik dengan prosentase yang sama 100%. Tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana ini diharapkan agar sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dapat tertangani secara cepat sehingga tidak mengganggu perekonomian masyarakat. Secara jelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
 Prosentase tertanganinya kerusakan Fisik Akibat Bencana
 melalui Rehabilitasi dan rekonstruksi Sementara Tanggap
 Darurat Pasca Bencana
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	jumlah kerusakan akibat bencana yang terbangun kembali melalui rahabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana			2	12	19
2	jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi			2	12	19
3	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana			100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Prosentase tertanganinya kerusakan fisik akibat bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sementara tanggap darurat pasca bencana adalah sebesar Rp 3.798.299.000,- dan capaian realisasi

keuangan yang mencapai 97,15% maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.

❖ Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan Program berikut ini:

- Penanganan Bencana Alam
- Peningkatan Penanganan Bencana
- Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos pada masa tanggap darurat

b. Prosentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Jumlah Penyintas (korban bencana) di Kabupaten Temanggung yang memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif, akan tetapi prosentase cenderung stabil yaitu 100% setiap tahunnya dari tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para Penyintas (Korban Bencana) semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat memulihkan meningkatkan kesejahteraannya. Secarajelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel.3.1

Prosentase Jumlah Penyintas (Korban Bencana) yang memperoleh bantuan sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 – 2018

No	Kriteria	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyintas (Korban Bencana) dalam 1 tahun yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	80	66	45	44	50	29
2	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	66	45	44	50	29
3	Persentase Korban	100	100	100	100	100	

No	Kriteria	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat						100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah sebesar Rp 64.500.000,- untuk 29 orang korban dan capaian realisasi keuangan yang mencapai 100 % maka pada sasaran ini terdapat efisiensi sumberdaya.
- ❖ Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh keberhasilan Program berikut ini:
 - Fasilitasi Penyaluran bansos
 - Monitoring dan evaluasi pasca bencana

c. Prosentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang dievakuasi menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat

Jumlah Penyintas (korban bencana) di Kabupaten Temanggung yang dievakuasi menggunakan sarana dan Prasarana Tanggap darurat selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dengan prosentase korban yang dievakuasi dengan sarana dan prasarana Tanggap Darurat relative stabil yaitu 100% dari tahun ke tahun.. Hal ini membuktikan bahwa kepedulian pemerintah terhadap para PMKS semakin nyata dengan harapan agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Secarajelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
 Jumlah Penyintas (Korban Bencana) yang dievakuasi
 menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2013 - 2018

No	Kriteria	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	jumlah korban bencana skala kab/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun		63	54	85	205	
2	jumlah korban bencana skala kab/ kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun		63	54	85	205	
3	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap		100	100	100	100	

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2018, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6.533.835.299 Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp 6.533.853.299 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.554.484.785,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 4.167.298.228,-
3. Belanja Modal (Bila Ada), sebesar Rp. 122.775.400,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	267.508.000	244.715.338	91%
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000	25.254.034	63%
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.808.000	28.168.556	91%
c	Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	14.992.000	100%
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000	11.934.850	99%
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	11.916.000	99%
f	Penyediaan bahan bacaan	2.700.000	2.640.000	98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
	dan peraturan perundang-undangan			
g	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	24.776.000	99%
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000	74.993.562	100%
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10.000.000	9.898.900	99%
j	Jasa pelayanan perkantoran	45.000.000	40.141.436	89%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	114.192.000	100.624.209	88%
a	Pengadaan peralatan gedung kantor	14.192.000	13.314.900	94%
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	6.918.000	69%
c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000	66.334.959	88%
d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000	14.056.350	94%
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	349.903.000	304.980.950	87%
a	Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana	155.113.000	143.008.950	92%
b	Pengembangan alat EWS Longsor	149.790.000	118.143.000	79%
c	Pegadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	45.000.000	43.829.000	97%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
2	Program Tanggap Darurat dan Logistik	2.664.149.000	2.313.319.981	87%
a	Penanganan Bencana Alam	821.747.500	563.473.000	69%
b	Peningkatan Penanganan Bencana	348.221.500	314.892.881	90%
c	Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos pada masa tanggap darurat	1.494.180.000	1.434.954.100	96%
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2.033.320.450	1.800.516.850	89%
a	Monitoring dan evaluasi pasca bencana	10.239.450	10.143.150	99%
b	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.984.156.000	1.753.130.400	88%
c	Fasilitasi penyaluran bansos bagi korban bencana	17.082.000	15.500.300	91%
d	Pelatihan Dukungan Psikososial Pasca Bencana	21.843.000	21.743.000	100%
	TOTAL	6.33.83.299	5.844.558.413	89 %

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	476.177.500	455.836.423	95,73
	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan;	1.500.000	1.499.855	99,99
	Penyusunan peta bencana alam;	474.677.500	454.336.568	95,71
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	236.360.000	217.127.576	91,86
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000	20.439.467	68,13
	Penyediaan jasa kebersihan kantor;	35.480.000	27.168.012	76,57
	Penyediaan alat tulis kantor;	9.000.000	8.997.800	99,98
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan;	9.000.000	8.999.905	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	4.000.000	4.000.000	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	2.400.000	2.040.000	85,00
	Penyediaan makan dan minuman;	21.000.000	20.273.000	96,54
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	80.000.000	79.745.942	99,68
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	10.000.000	9.993.500	99,94
	Jasa pelayanan perkantoran	35.480.000	35.469.950	99,97
	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	116.000.000	113.600.015	97,93
	Pengadaan peralatan gedung kantor;	31.000.000	30.000.000	96,77
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;	10.000.000	8.865.000	88,65
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;	60.000.000	59.735.015	99,56
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;	15.000.000	15.000.000	100,00
	Program Peningkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana	20.000.000	19.999.950	100,00
	Peningkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana;	20.000.000	19.999.950	100,00
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	29.862.700	99,54
	Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kekeringan;	30.000.000	29.862.700	99,54
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	332.042.500	321.585.390	96,85
	Diklat dan simulasi penanganan bencana;	80.000.000	75.118.300	93,90

	Rintisandesatanggubencana;	87.980.000	86.715.300	98,56
	Penyusunan data base rawanbencana;	19.095.000	17.073.000	89,41
	Kesiapsiagaanbencana/mitigasibencana;	144.967.500	142.678.790	98,42
	Program TanggapDaruratdanLogistik	3.798.299.000	3.689.873.435	97,15
	Penangananbencanaalam;	803.431.000	743.953.645	92,60
	Peningkatanpenangananbencana;	298.468.000	296.137.590	99,22
	Penanganandaruratpemulihanfasum/fasosp adamasatanggapdarurat;	2.696.400.000	2.649.782.200	98,27
	Program RehabilitasidanRekonstruksiPascaBencana	1.480.985.400	1.455.288.250	98,26
	Monitoring danevaluasipascabencana;	19.010.000	17.619.150	92,68
	Rehabilitasidanrekonstruksipascabencana;	1.398.700.000	1.383.456.100	98,91
	Fasilitasipenyalaranbansosbagikorbanbencana;	15.054.400	14.341.950	95,27
	Pelatihanpengkajiankebutuhanpascabencana;	48221000	39.871.050	82,68
		6.489.864.400	6.303.173.739	97,12

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, apabila dibandingkan Tahun 2017 maka terjadi **kenaikan** sebesar, Tahun 2018 sebesar, Tahun 2017 sebesar 97,12.%



BAB IV PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai organisasi perangkat daerah teknis yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat saat kondisi darurat bencana
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Amat Baik**) Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut : Hasil Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 100% pada sasaran Strategis Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan dan Penanganan bencana, dengan masing-masing indikator kinerja utama mencapai 100%

A. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masa mendatang antara lain :

1. Perlunya koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pelaku penanggulangan bencana
2. Melibatkan secara langsung stakeholder dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membuat jejaring bencana di seluruh wilayah kabupaten sehingga informasi bisa secara cepat tersampaikan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang
Sekian dan terima kasih

Temanggung, 2019
Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

WALNGADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19630205 199303 1 005